

***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN VIDEO
COMPACT DISC PORNO BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2009 TENTANG PORNOGRAFI***

Oleh : Ira Rahayu

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Lady Diana, SH.,MH

Alamat : Letjen Supratman No 53 B

Email : irahayu456@gmail.com

ABSTRACT

Crime in the field of pornography is one of the fast growing criminal activity due to the developments in technology and information. Various things have been done to reduce the occurrence of criminal acts in the field of brands ranging from the establishment of Law No. 44 Year 2008 on Pornography. However, in the field of pornography is a crime still existed in society, even predictable crimes against counterfeiting in this brand though it was addressed, will continue to increase. Based on these reasons underlying the author's interest to write a thesis with issues such how law enforcement in criminal acts memperjualbelikan compac video disc / VCD porn under article 29 of Law No. 44 of 2008 concerning the setting pornography. This thesis is empirical juridical case studies jurisdictions Pekanbaru City Police Sector.

In Indonesia alone, the problem of pornography is not new. Where in the Criminal Code concerning pornography has been set in Article 281, 282, 283, and Article 533 of the Criminal Code. Besides the problem of Pornography also set in the Broadcasting Law, the Law of Film, Press Law, the Telecommunications Act, Act ITE. However, because the Indonesian government feels that the existing provisions in the Act that have been there was less strong binding of the perpetrators, the government then sought a ban on pornography that has been set out in a regulation of pornography, namely Law No. 44 Year 2008 on Pornography.

Regarding the implementation of Law No. 44 Year 2008 on Pornography against the seller VCD / DVD porn must be fulfilled principal elements contained in the indictment that charged by the public prosecutor.

Keywords: Pornography Crime-Crime-Video Compac Disc / VCD

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sejak awal kemerdekaan para bapak bangsa ini sudah menginginkan bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.

Penegakan hukum sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa mulai dari masyarakat, kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga-lembaga advokasi.

Seluruh masyarakat Indonesia mendambakan terwujudnya keadilan di Indonesia maka penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum harus tidak boleh tidak diwujudkan.

Modus kejahatan pornografi pada sekarang ini sangat beragam di antaranya yaitu dengan memperjualbelikan video compact disc di tengah-tengah masyarakat penjualan kaset-kaset porno di pinggir jalan, peredaran video porno melalui handphone maupun internet serta pertunjukan nyanyian yang nyanyiannya bergoyang pinggul dengan gerakan seolah-olah bersenggama. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat bersama di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan.

Pada realita yang terjadi di Indonesia sekarang ini banyak sekali terjadi suatu penyampain secara pornografi secara bebas yaitu dengan memperjualbelikan video compact disc porno di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, lainnya hanya sedikit sekali kasus tentang memperjualbelikan porn video compact disc oografi yang diproses secara hukum. Hal ini biasanya terjadi karena aparat penegak hukum

terlalu menganggap kecil masalah seperti ini, padahal sesungguhnya dampak yang ditimbulkan adalah sangat besar. Selain itu bisa saja dikarenakan oleh kurangnya pemahaman aturan hukum oleh aparat penegak hukum tentang masalah memperdengarkan pornografi sehingga tidak tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang padahal itu menunjukan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang kesusilaan masyarakat.¹

Berdasarkan data dari Polisi Sektor Pekanbaru Kota, penulis mendapatkan data mengenai data tindak pidana pornografi yang memperjualbelikan porno video compact disc di tempat penjualan kaset-kaset.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana memperjualbelikan video compact disc porno menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian dengan judul yaitu: **“Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Memperjualbelikan Video Compact Disc Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana memperjualbelikan video compact disc porno oleh Kepolisian di wilayah hukum Polisi Sektor Pekanbaru Kota ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana

¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005.hlm.21

memperjualbelikan video compact disc porno di wilayah kepolisian Sektor Pekanbaru Kota ?

3. Upaya apakah yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pemberantasan tindak pidana memperjualbelikan video compact disc porno di wilayah Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana memperjualbelikan video compact disc porno oleh Kepolisian di wilayah hukum Polisi Sektor Pekanbaru Kota
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pemberantasan tindak pidana memperjualbelikan video compact disc porno oleh Kepolisian di wilayah hukum Polisi Sektor Pekanbaru Kota
- c. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pemberantasan tindak pidana memperjualbelikan porno oleh video compact disc Kepolisian di wilayah hukum Polisi Sektor Pekanbaru Kota

2) Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana.
- b. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data skunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan

pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait yang berada di wilayah Kepolisian Sektor Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *straafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²

Simons merumuskan *straafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³

2. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan impian setiap warga negara Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 yang dimana hal tersebut sangat memerlukan peraturan Perundang-Undangan yang mampu menganyomi semua kalangan masyarakat dan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

³ *Ibid.*

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴

Apabila terjadi suatu masalah hukum atau tindak pidana maka tidak akan terlepas daripada upaya penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana. Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejewatahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Pada hakikatnya manusia dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat mempunyai pandangan-pandangan yang baik dan buruk terhadap pemberlakuan suatu hukum yang diterapkan oleh penguasa. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan nilai tertentu yang berbeda satu dengan yang lain, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan individu, dan pasangan-pasangan nilai yang lainnya.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada intinya merupakan penerapan kebijakan yang menyangkut menyangkut pada membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu baru berada dan berhenti pada pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih lebih dalam lagi kedalam dunia hukum yang sebenarnya.⁶

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

2) Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris (yuridis sosiologis) dimana yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat.⁷ Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif.⁸

3) Sumber Data

a.Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan cara

⁴AL.Wisnubroto dan G.Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung:2005,hlm.1.

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011,hlm.5.

⁶Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.15.

⁷Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandiri Maju, Bandung: 1995, hlm. 61.

⁸Supranto, *Metode Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 14.

wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam tindak pidana pornografi video compact disc porno.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan hukum Tertier

Yaitu semua bahan dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan sebagainya.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode berikut ini :

- a) Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b) Wawancara, metode wawancara yang dipilih adalah metode wawancara non struktur yaitu peneliti bebas menanyakan

pertanyaan kepada responden tanpa terikat daftar-daftar pertanyaan kepada Pihak Kepolisian Sektor Sosa Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

- c) Kuisioner yaitu dengan memberikan semi terbuka kepada responden tentang tindak pidana memperjualbelikan video compact disc porno.

d) Studi Pustaka

Yaitu penulis mengambil kutipan dari bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

5) Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun studi kepustakaan telah terkumpul, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁹

Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya. Yang dilakukan dengan upaya-upaya yang hanya didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Pornografi dan Dampak Pornografi

⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 2006, hlm.72.

Fenomena kehidupan manusia merupakan suatu fenomena yang paling rumit dan paling kompleks di dunia ini, fenomena kehidupan tersebut melingkupi berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di sini keberadaan hukum harus dapat menjadi alat regulasi kemasyarakatan yang dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga negara secara menyeluruh baik itu dalam aspek-aspek sosial, politik ekonomi budaya, bahkan hukum yang berperan juga terhadap perubahan dalam masyarakat.

Perkembangan peradaban kehidupan masyarakat, dengan segala kemajuan yang ada yang semakin mengglobalisasi, di dalam kehidupan masyarakat banyak berbagai macam tindak pidana pornografi salah satunya adalah tindak pidana memperjualbelikan pornografi dalam bentuk video compact disc (VCD) di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Tentu dengan adanya tindak pidana tersebut maka masyarakat Indonesia dan generasi muda mudah saja mendapatkan video compact disc di mana saja bahkan penjualan kaset-kaset di pinggir jalan sudah menjadi hal yang di kenal oleh kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Tentang Pornografi No. 44 Tahun 2008 diberikan suatu definisi tentang pornografi yaitu: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁰

Dalam pengertian aslinya, pornografi secara harafiah berarti “tulisan tentang pelacur”, mulanya adalah sebuah eufemisme dan secara harafiah berarti “(sesuatu yang) dijual”. Kata ini berasal dari istilah Yunani untuk orang-orang yang mencatat *pornoai*, atau pelacur-pelacur terkenal atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari zaman Yunani kuno. Pada masa modern, istilah ini diambil oleh para ilmuwan social untuk menggambarkan pekerjaan orang-orang seperti Nicholas Restif dan William Acton, yang pada abad ke-18 dan 19 menerbitkan risalah-risalah yang mempelajari pelacuran dan mengajukan usul-usul untuk mengaturnya. Istilah ini tetap digunakan dengan makna ini dalam Oxford English Dictionary hingga 1905.¹¹

Pornografi telah memberikan dampak negatif terutama kepada anak. Beberapa dampak negatif itu antara lain:¹²

1. Pelecehan seksual

Setelah melihat tayangan pornografi, biasanya orang yang bersangkutan lalu mencari cara untuk melampiaskan dorongan seksnya. Anak usia dini adalah individu yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual, apalagi di Indonesia sendiri pendidikan seks untuk anak bagi sebagian besar orangtua masih tabu dan belum waktunya

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi

¹¹ *Ibid*

¹² <http://bapakethufail.wordpress.com/2008/10/22/dampak-pornografi-bagi-perkembangan-anak/>, di akses tanggal 1 April 2015

diberikan. Hasilnya anak sering menjadi korban pelampiasan seks oleh orang disekitarnya terutama yang dekat dengan anak.

2. Penyimpangan seksual

Anak balita atau anak usia dini yang belum waktunya sudah melihat adegan atau tayangan hubungan intim suami istri atau tayangan–tayangan porno lainnya, dan tidak ketahuan orangtua sehingga tidak langsung diberi pemahaman.

3. Sulit konsentrasi

Bagaimana bisa konsentrasi kalau yang ada dalam pikiran anak adalah pikiran-pikiran kotor. Belum lagi kalau anak belum paham sehingga yang ada dalam otak anak adalah berbagai pertanyaan seputar adegan atau tayangan porno yang baru dia lihat. Yang bahaya lagi, kalau sudah tertanam dalam otak maka untuk menghapus akan sangat sulit. Hal ini dikarenakan seks merupakan kebutuhan dasar manusia. Anak yang sudah menemukan kenikmatan seks sebelum waktunya dan tertanam secara mendalam dalam pikirannya akan sulit untuk dihilangkan.

4. Tidak percaya diri

Anak bisa saja jadi tidak percaya diri, hal ini karena frame yang dia lihat dari maraknya tayangan TV atau bahkan lingkungan disekitarnya, ”kalau mau cantik dan punya banyak teman ya harus berpakaian terbuka”, ”kalau berpakaian tertutup kuper gak gaul, ndeso”. Besok-besok anak akan muncul PD-nya ketika berpakaian minim dan terbuka.

5. Menarik Diri

Anak yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual biasanya cenderung menarik diri, tertutup dan minder. Apalagi kalau orangtua tidak segera mencari bantuan psikolog dan cenderung menyalahkan anak, memarahi atau menggunakan kekerasan

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pornografi

a. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1)TindakPidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1)

2) Tindak Pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat 1)

3)Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh pornografi (Pasal 31 Jo Pasal 5)

4) Tindak Pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 Jo Pasal 6)

5) Tindak Pidana menandai atau memfasilitasi perbuatan pornografi (Pasal 33 Jo Pasal 7 Jo Pasal 4)

6)Tindak Pidana sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 Jo Pasal 8)

7) Tindak Pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model

pornografi (Pasal 35 Jo Pasal 9)

- 8) Tindak Pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaann (Pasal 36 Jo Pasal 10)
- 9) Tindak pidana pornografi melibatkan anak (Pasal 37)

3. Pengaturan Tentang Pornografi di Indonesia

Undang-Undang pornografi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari kamis, 30 Oktober 2008 merupakan keberhasilan bangsa dan negara Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan. Larangan pornografi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1917, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur dan menentukan larangan serta hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi yaitu terdapat dalam Pasal 281, 282, 283, 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetap, ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak efektif, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Tujuan dibentuknya undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi antara lain yaitu:

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha

Esa, serta menghormati harkat martabat kemanusiaan.

2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat¹³

Tujuan dibentuknya undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi antara lain yaitu:

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat martabat kemanusiaan.
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks dimasyarakat.¹⁴

4. Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Memang disadari bahwa kemajuan teknologi ternyata memberikan ruang bagi penyebaran pornografi, sebut saja penggunaan komputer untuk menggandakan file-file bermuatan pornografi ke dalam VCD, kemudian dijual atau disewakan kepada orang yang berminat. Internet yang sering

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2002, hlm.40

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2002, hlm.40

digunakan untuk transaksi dagang, penyebaran ilmu pengetahuan, penyebaran berita, ternyata dapat pula dimanfaatkan untuk menyebarkan pornografi dalam bentuk informasi elektronik berupa gambar, foto, kartun, gambar bergerak, dan bentuk lainnya. Pro dan kontra mewarnai sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi, sanksi pidana, dan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah dan DPR RI menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang pornografi dengan pertimbangan bahwa pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi dipandang sudah semakin luas dan dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat.

B. Tinjauan Umum Terhadap Video Compact Disc

1. Pengertian Video Compact Disc

VCD adalah merupakan manifestasi dari berbagai hak ekonomi yang dimiliki oleh artis film/televisi, pemusik, pelawak dan lain sebagainya, namun juga merugikan masyarakat itu sendiri, yaitu hilangnya rasa menghargai terhadap hak milik orang lain, masyarakat juga mengalami kerugian terutama terhadap hasil gambar dan suara serta penggunaan kaset VCD bajakan tersebut juga dapat merusak player mereka sendiri, terjadinya kemerosotan moralitas terutama dikalangan generasi muda karena VCD-VCD ilegal yang beredar dipasaran tidak saja VCD-VCD “sopan”, namun juga beredar VCD-VCD porno.¹⁵

Pasal 1 angka

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkannya.

2. Sejarah Singkat Perkembangan Video Compact Disc

Proses perkembangan video porno di Indonesia lumayan cepat dan pesat, yang awalnya sangat jarang video porno lokal beredar, sekarang sudah seperti virus. Mulai tahun 1980-an teknologi digital recording mulai berkembang. Tahun 1984 Sony memperkenalkan Compact Disc CD yang berbentuk seperti cakram kecil dengan lubang ditengahnya. Ide dari pembuatan CD ini adalah merampingkan bentuk media penyimpan musik populer selama ini yaitu kaset yang dirasa terlalu besar.¹⁶

Disamping itu pengenalan CD ini juga bertujuan untuk membuat kualitas audio yang dihasilkan menjadi lebih baik selain kepraktisan dalam penyimpanannya. Lahirnya CD kemudian diikuti oleh lahirnya VCD dan DVD yang dapat menyimpan bentuk visual bergerak selain dapat menyimpan bentuk audio. Dan pada tahun 1990-an budaya rekaman sudah mencapai era yang sangat berubah dari budaya awal dengan segala kemudahan menggunakan peralatan multimedia, dengan semua sudah berupa file digital, hobbyist dan pemakai komputer biasa sudah bisa merekam dan

¹⁵ www.ristek.go.id, “Penegakan HAKI Pengaruhi Moralitas Bangsa”, 18 Juni 2015.

¹⁶ <http://ppigronigen.nl/isc>. Di Akses pada tanggal 08 Juni 2015.

mengedit materi digital dan memixingnya.¹⁷

3. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Memperjualbelikan Video Compact Disc

Dalam penanganan tidak pidana pornografi, penanganannya dan aparat yang menangani pada dasarnya sama, meskipun ada pengecualian yang mana akan disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana memperjualbelikan video compact disc itu sendiri, hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam ketentuan hukum yang sama, seperti yang diatur dalam KUHAP yakni pihak yang terkait dalam proses penanganan tindak pidana memperjualbelikan video compact disc adalah.

1. Pejabat Kepolisian

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 5 KUHAP).¹⁸

2. Pejabat Kejaksaan

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut asas oportunitas, yang mana tugas dalam penuntutan perkara pidana akan diambil oleh negara, dan kewenangan ini dipegang oleh Instansi kejaksaan sebagai perwakilan dari negara yang memperkarakan perkara pidana,

hal tersebut dapat kita lihat dalam KUHAP.

3. Penasehat Hukum

Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.¹⁹

4. Pejabat Kehakiman

Aspek kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung luas dan jenisnya. Undang-undang yang berlaku tidak mungkin mengatur secara menyeluruh seluruh aspek tersebut, sehingga aparat penegak hukum terutama hakim sangat berperan dalam membentuk hukum. Hukum sebagai aparat penegak hukum tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum ada hukumnya, hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curianovit*).²⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Vidio Compact Disc Porno Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polisi Sektor Pekanbaru Kota

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota pada dasarnya telah diatur oleh KUHAP, dimana ketentuan tentang penyelidikan dan penyidikan diatur dalam BAB XIV KUHAP dilakukan oleh aparat kepolisian yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan proses dalam pemeriksaan :

1. Adanya laporan

2. Penyelidikan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 101.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Tubangun Roni Rahman, *Tegaknya Hukum*, Grafika, Bandung: 2008, hlm. 29.

3. Penyidikan
4. Penangkapan
5. penahanan
6. Penyitaan
7. Penyerahan berkas perkara ²¹

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pornografi di Toko Kaset Yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota

Berbicara mengenai penegakan hukum pornografi, khususnya pornografi memperjualbelikan video compact disc porno. Aparat kepolisian tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Hambatan— hambatan ini dirasakan cukup menyulitkan bagi pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana pornografi. kelapa sawit yang ada di wilayah Kepolisian Sektor Sosa.

Yang menjadi hambatan dari aparat kepolisian dalam memberantas kejahatan ini adalah:

1. Pengetahuan Tentang cover video compact disc yang berupa polos dan biasa.

Dalam mengungkap dan memproses secara hukum kasus-kasus pornografi polisi mengandalkan kerjasama. Kata IPDA HR, Panjaitan Kanit Reskrim Polisi Sektor Pekanbaru Kota. menurut bapak Panjaitan masih menghadapi kendala saat mengungkap tindak pornografi melalui video compact disc. Karena sangat jarang video compact disc yang covernya

bermuatan gambar pornografi yang mencolok disinilah aparat kepolisian harus teliti dan sangat jeli dalam menangani kejahatan ini. Selain sumber daya manusia, peny²²

2. Kurangnya koordinasi antara penyidik kepolisian sektor kota pekanbaru dengan para pemilik toko kaset video compact disc yang ada di kota Pekanbaru.

Selain menjadi ujung tombak dari kerangka pemberdayaan teknologi, toko kaset juga merupakan ujung tombak dari pura-pura penikmat pembeli video compact disc porno ini. Pengusaha tau pemilik toko kaset menghadapi dilema sehingga sering mengabaikan peraturan. Dilema-dilema tersebut adalah:

1. Kaset porno merupakan daya tarik yang luar biasa dan menjadi alasan bagi konsumen untuk mengenal dan menikmati kaset pornografi yang dijual, dan bagi pemilik toko kaset ini merupakan icon kebutuntungan.
2. Adanya larangan atau himbauan bagi pembeli kaset untuk tidak membeli kaset porno juga akan menurunkan jumlah konsumen yang datang.
3. Untuk mengawasi para konsumen yang membeli kaset porno juga harus memiliki karyawan yang lebih dan itu akan mengeluarkan biaya tambahan bagi pemilik toko kaset.

3. Kerahasiaan antara penjual dan pembeli video compact disc

Bapak IPDA HR. Panjaitan menerangkan bahwa sulit bagi penyidik untuk mengetahui transaksi memperjualbelikan video compact disc porno, karena penjual dan pembeli melakukan transaksi secara rahasia dan tertutup dan

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Fetrus (Penyidik Umum) pada tanggal 07 Agustus 2015 Pukul 09.30 WIB di Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota

²² *Ibid.*

itupun kadang para penjual hanya mau memperjualbelikan video compact disc porno kepada konsumen yang sudah lama.²³

C. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pemberantasan tindak pidana memperjualbelikan porno video compact disc oleh Kepolisian di wilayah hukum Polisi Sektor Pekanbaru Kota

Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota yaitu dengan meningkatkan pengetahuan mengenai video compact discs porno dan bagaimana mengcover video compact disc porno tersebut agar kedepannya mereka tidak kesulitan lagi dalam mendapatkan video compact disc tersebut, kemudian aparat Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota mengawasi secara diam-diam mengenai transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini supaya aparat kepolisian tidak kecolongan dengan adanya tindak pidana memperjualbelikan video compact disc tersebut. Karena maraknya pornografi di Indonesia ini membuat masyarakat resah dengan adanya hal itu, maka para pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk sama-sama memberantas tindak pidana pornografi yang ada di kota Pekanbaru.²⁴

Kemudian upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota dengan melakukan koordinasi dengan tim penyidik Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota dengan Tim Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tentang adanya

tindak pidana memperjualbelikan video compact disc yang terjadi di sepanjang jalan Jenderal Sudirman tersebut. Dengan begitu para aparat penegak hukum sama-sama menjaga keamanan para masyarakat dari maraknya video compact disc tersebut.

Upaya terakhir yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota yaitu dengan melakukan koordinasi dengan para pemilik toko kaset video compact disc agar para penjual tersebut tidak melakukan tindak pidana memperjualbelikan video compact disc tersebut kepada masyarakat yang ada di Pekanbaru, dan para aparat kepolisian memberikan suatu penjelasan kepada para penjual kaset tentang bahayanya pornografi dan pornoaksi yang marak terjadi, dan buruknya dampak dari kejahatan tersebut bagi para generasi muda yang ada di kota Pekanbaru, dan bagaimana dampak yang akan timbul jika kejahatan tersebut dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama tahun 2013-2014 ada 21 tindak pidana memperjualbelikan video compact disc yang masuk ke Polisi Sektor Pekanbaru Kota dan keseluruhan kasus tersebut dilakukan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan) karena adanya bukti yang kuat yang dimiliki oleh penyidik. Karena penyidik telah menemukan video compact disc di tempat kejadian perkara. Dengan begitu polisi langsung melakukan interogasi kepada para pelaku tindak pidana memperjualbelikan video compact disc tersebut guna untuk membuat surat keterangan pelaku yang kemudian di tuangkan dalam BAP (berita acara penangkapan)

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA HR. Panjaitan (Kanit Reskrim) pada tanggal 08 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB di Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru

²⁴ *Ibid.*

oleh penyidik Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolsian Sektor Pekanbaru Kota dalam menegakkan hukum pornografi adalah karena penjual melakukan transaksi dengan rahasia hanya kepada pelanggan yang di kenal saja, dan yang menjadi kendala lainnya adalah Kepolsian Sektor Pekanbaru Kota harus mencari satu-satu kepingan video compact disc yang dalam kemasan, karena yang terjadi saat ini adalah kepingan video compact disc di bungkus dengan bungkus cover film kartun anak-anak atau dengan menggunakan cover lagu-lagu. Jadi Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota harus teliti dan jeli dalam mencari keping kaset video compact disc tersebut. Kemudian karena kurangnya koordinasi antara Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota dengan para penjual kaset tersebut yang ada di sepanjang Jalan Jendral Sudirman.
3. Upaya yang dilakukan aparat kepolsian yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai dampak yang buruk apabila terjadi kejahatan tentang pornografi tersebut, para aparat kepolsian juga meningkatkan pengetahuan mengenai pembungkusan atau pengcoveran keping video compatc disc tersebut, dan dengan meningkatkan koordinasi tim penyidik aparat Kepolsian Sektor Pekanbaru Kota dengan Aparat Kepolsian Resort Kota Pekanbaru agar sama-sama menjaga kota Pekanbaru dari kejahatan tindak pidana pornografi. Para aparat kepolsian juga melakukan koordinasi dengan para penjual kaset video compact disc tentang penjualan kaset-kaset mereka.

B. Saran

1. Masyarakat perlu menyadari bahwa video compact disc porno sebagai tindak pidana yang memiliki dampak yang tidak baik bagi generasi muda dimasa mendatang, oleh karena itu perlu adanya dukungan upaya pemerintah dan penegak hukum khususnya kepolsian dalam mengetahui hal tersebut.
2. Pemerintah juga perlu menyiapkan aparat penegak hukum yang sigap dan handal dalam kejahatan memperjualbelikan video compact disc tersebut, dan berkompeten dalam penerapan dan penegakan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam rangka menanggulangi tindak pidana memperjualbelikan video compact disc.
3. Pihak kepolsian harus meningkatkan koordinasi dengan pemilik toko kaset untuk mensosialisasikan bahaya pornografi bagi setiap orang yang membeli kaset tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Barda, Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Asti, Muchlisin, Badaitul, Gurita *Pornografi Membelit Remaja*, Qase Qalbu, Porwodadi.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta

- Deaux, K, 1993, *Social Psychology in The 90's*, Wadsworth Inc, California
- Djubaedah, Neng, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi di Tinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandiri Maju, Bandung.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutabarat, Ramli, 1985, *Persamaan di Depan Hukum (Equality before the law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Machmud, Syahrul, 2011, *Penerapan Undang-undang Pornografi pada Kasus Ariel Peterpn*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktek-Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1968, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Erisco, Bandung.
- Rais, Fatahullah, Moch Lukman, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- Shaleh, Roeslan, 1989, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta.
- _____, 2011, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supranto, 2003, *Metode Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syahrifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Wiryan, Syahril & Wagiman, Wahyu, 2007, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi Dalam RUU KUHP*, ESLAM dan Alinasi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.

Wisnubroto, AL dan G. Widiatama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tubangunm Rahman, Roni, 2008, *Tegaknya Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum*, Libery Yogyakarta, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Goesniadhe, Kusnu, 2010, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, Edisi 17, No. 2 April.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

B. Website:

<http://www.KangBoed.Wordpress.com>, diakses tanggal 21 April 2015

<http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>, diakses tanggal 20 Juli 2015.

[http://bapakethufail.wordpress.com/2008/10/22/dampak-pornografi bagi perkembangan-anak](http://bapakethufail.wordpress.com/2008/10/22/dampak-pornografi-bagi-perkembangan-anak). Diakses tanggal 1 April 2015.

<http://www.ristek.go.id>." Penegakan HAKI Pengaruh Moralitas Bangsa", di akses tanggal 21 Juni 2015.

<http://ppigroneigen.nl/isc>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2015.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Audio-digital>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2015.